LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2025

JUDUL

"KAJIAN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG"

Fokus Strategis

Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tim Ahli

Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si

Tenaga Ahli Bidang Perikanan dan Pariwisata

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Keanekaragaman hayati memainkan peran kunci dalam menjaga ekosistem dan fungsi lingkungan. Keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya berperan penyediaan pangan, obat-obatan, sumber daya air, sumber daya genetik, dan energi. Keanekaraggaman hayati juga menyediakan jasa pengaturan alam seperti pengaturan iklim, kuualitas air, dan penguraian limbah. Tidak kalah pentingnya keanekaragaman hayati menyediakan jasa-jasa budaya seperti spiritual, agama, adat istiadat, dan ekowisata. Budaya masyarakat adat dan pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan sumber daya hayati juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kita dapat memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Dengan memahami dan menghargai peran penting keanekaragaman hayati, kita dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Merespon pentingnya keanekaragaman hayati agar diperhatikan keberadaannya dalam pembangunan berkelanjutan, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan yang berisi instruksi antara lain untuk menetapkan kebijakan sektor untuk rnengarusutamakan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan; menerapkan prinsip adanya pembagian keuntungan yang adil dan merata

atas pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan melakukan fungsi penegakan hukum dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati.

Salah satu mandat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan kepada pemerintah daerah, termasuk kepada Bupati/Wali Kota adalah menyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Tingkat Kabupaten/Kota. Mandat kepada pemerintah daerah ini semakin mendesak untuk segera dijalankan mengingat tantangan besar berupa tiga krisis utama (triple planetary crisis) yang dihadapi masyarakat global, yakni krisis perubahan iklim, krisis kerusakan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta krisis polusi dan limbah.

Di tengah krisis global ini, Kabupatetn Klungkung memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung menyimpan kekayaan flora, fauna, dan ekosistem unik yang tidak hanya menjadi aset lokal, tetapi juga bagian penting dari upaya global untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padadng lamun, dan mangrove yang ada di Kabupaten Klungkung, merupakan rumah bagi berbagai spesies langka dan kharismatik seperti ikan mola mola dan ikan pari manta. Ekosistem-ekosistem pesisir tersebut juga menjadi benteng alami yang melindungi dari abrasi, penyediaan pangan melalui perikanan, sekaligus menyimpan karbon biru (blue carbon) yang signifikan. Keanekaragaman hayati terrestrial juga tergolong tinggi, beberapa diantaranya merupakan sumber daya genetik atau plasma nutfah yang menopang ketahanan pangan lokal dan identitas daerah.

Keanekaragaman hayati Kabupaten Klungkung saat ini menghadapi berbagai ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari kita semua. Kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan yang tadinya lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun. Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak dapat dihindari karena pesatnya aktivitas wisata bahari. Meningkatnya lahan budidaya yang terlantar juga menyebabkan beberapa plasma nutfah tidak terselamatkan. Eksploitasi berlebihan terhadap keanekaragaman hayati tertentu, invasi spesies asing, hingga fenomena budidaya spesies non-lokal terus memberikan tekanan besar terhadap kekanekaragaman hayati di daerah. Ancaman ini tidak hanya mengancam kelestarian flora dan fauna serta ekosistemnya, tetapi juga merusak keseimbangan ekologi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan dan krisis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang kita miliki adalah kekuatan sekaligus anugerah yang harus dijaga kelestariannya. Dengan melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati sebagai bagian dari sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, Kabupaten Klungkung dapat menjadi model keberhasilan dalam menjawab tantangan global tersebut.

Kajian Profil Keanekaragaman Hayati dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen Kabupaten Klungkung dalam melestarikan kekayaan hayati, sekaligus mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan di daerah akan selalu memperhatikan aspek

keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian ekosistem, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

I. Maksud dan Tujuan

Kajian Profil Keanekaragaman Hayati dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati dan pengembangan nilai manfaat keanekaragaman hayati secara berkelanjutan melalui suatu perencanaan yang terpadu/komprehensif, efektif dan partisipatif di daerah. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah dokumen kerangka perencanaan strategik untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkann tujuan Kajian Profil Keanekaragaman Hayati dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah sebagai berikut:

1. Memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko kepunahan spesies, dan menjaga keanekaragaman genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah harus dilakukan secara holistik/menyeluruh baik pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik. Arah pengelolaan dimulai dari perencanaan tata ruang yang terintegrasi darat dan laut serta mempertimbangkan pelestarian keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, hingga aksi pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetik.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Manfaat keanekaragaman hayati mencakup penguatan ketahanan pangan, penyediaan bahan material, farmasi, riset, pelestarian budaya dan fungsi esensial lainnya. Hal tersebut menjadikan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati juga memiliki peran krusial dalam memastikan sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat dan generasi yang akan datang.

3. Memperkuat tata kelola atau means of implementation (MOI) keanekaragaman hayati, melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan finansial; serta penguatan regulasi dan penegakan hukum. Faktor penting dalam implementasi adalah kondisi pemungkin (enabling condition) bagi strategi dan rencana aksi agar terlaksana dengan baik, antara lain ketersediaan sumber daya finansial, pengayaan dan penguatan ilmu pengetahuan melalui riset dan inovasi, serta perluasan jaringan distribusi data, informasi, dan pengetahuan secara terbuka dan tersebar merata. Hal tersebut diperkuat dengan jejaring kemitraan para pihak secara kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterbukaan dari perencanaan hingga pelaksanaan, terutama dalam perumusan strategi dan aksi pengelolaan.

II. Ide dan Gagasan

Analisis dan Sintesis

Perencanaan pengelolaan keanekaragaman

hayati daerah yang tepat-guna dan berhasil-guna memerlukan data dan informasi keanekaragaman hayati yang baru, lengkap dan akurat. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah diawali dengan melakukan analisis dan sintesis terhadap Profil Keanekaragaman Hayati Daerah (database keanekaragaman hayati daerah).

Melalui proses analisis dan sintesis dokumen Profil tersebut, akan diketahui beberapa informasi sebagai berikut:

1. Potensi keanekaragaman hayati di daerah, termasuk potensi unggulan.

2. Kondisi dan kecenderungan keanekaragaman hayati di daerah, seperti ancaman kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati, factor penyebab dan dampak dari kerusakan keanekaragaman hayati tersebut.

3. Potensi pengelolaan dipunyai oleh daerah dan skenario/upaya serta prasarana dan sarana pendukung untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari, seperti kapasitas SDM, kelembagaan, pendanaan, perangkat pengelola, komitmen pemda dll. 4. Kebijakan dan kelembagaan pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah.

Selain hal tersebut di atas, perlu dilakukan analisis dan sintesis terhadap nilai manfaat berbagai kebijakan danprogram konsevasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati daerah secara berkelanjutan, termasuk program dan kebijakan dari masing-masing sektor serta aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Formulasi

Tahap formulasi Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dilakukan untuk merumuskan arah dan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati pada masa lalu dan yang datang. Untuk itu, pada tahap ini sangat diperlukan koordinasi lintas unit satuan kerja dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait. Pada tahap ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Visi adalah suatu pernyataan tentang arah yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan Langkah penting gunamewujudkan tujuan pengelolaan keanekaragam hayati daerah. Setelah itu, ditetapkan misi pengelolaan keanekaragaman hayati. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan untuk guna mencapai visi yang telah ditetapkan.Pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari semua pihak. Secara langsung, pernyataan visi dan misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjukpenilaian kinerja. Interpretasi lebih mendetail diperlukan agar pernyataan visi dan misi dapat diterjemahkan ke langkah langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan sebagaimana tertulis dalam pernyataan visi dan misi. Untuk itu, visi dan misi yang telah dirumuskan dilengkapi dengan uraian mengenai tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Sasaran yang ditetapkan/diharapkan dapat bersifat kuantitaif sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Konsultasi Publik

Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan. Tujuan konsultasi publik adalah:

1. Sosialisasi draft Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah sehingga semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.

2. Mendapatkan saran dan masukan dari publik guna pengayaan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.

III. Rekomendasi

Mengingat pentinganya peran keanekaragaman hayati bagi pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat, maka direkomendasikan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koleksi ilmiah, penelitian dan pengembangan di bidang data dan informasi keanekaragaman hayati serta eksplorasi bioprospeksi.

2. Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Kabupaten pada tahun anggaran 2026.

Semarapura, 30 Juni 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-